



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA NOTA KEUANGAN**

Disampaikan Oleh : Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

Nomor Anggota : A - 429

Bismillahirrahmanirrahim

:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan semesta alam, pemilik kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kita bersyukur bersama seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, dapat memperingati dan merayakan 78 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah ketidakpastian global, tantangan krisis energi dan pangan, harga-harga komoditas global yang bergejolak, serta dinamika geopolitik di kawasan dan belahan dunia lainnya.

Fraksi PKS DPR RI mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Dirgahayu Republik Indonesia. Kita harus terus semangat dan optimis dalam membangun bangsa. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Ia hadir, sebagaimana disebut dalam UUD 1945 "atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa". Ia juga hadir atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan pendiri bangsa. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada para pahlawan kita berterima kasih seraya mengirimkan doa kebaikan.

Indonesia termasuk negara pertama yang merdeka pasca Perang Dunia ke-2. Kemerdekaan bangsa kita menginspirasi negara-negara terjajah lainnya khususnya di Asia dan Afrika untuk merdeka. Bahkan Indonesia menjadi inisiator perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia ketika menggelar Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

Sebagai inspirator dan inisiator kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, nyatanya perjalanan bangsa Indonesia tidak mudah bahkan terseok-seok dalam mewujudkan tujuan bernegara untuk mensejahterakan rakyat. Indonesia terjebak dalam "*middle income trap*", berpuluh tahun sebagai negara berkembang dan belum beranjak menjadi negara maju. Padahal, negara-negara lain yang merdeka hampir bersamaan atau belakangan telah jauh lebih maju seperti Korsel dan Singapura.

Kita syukuri pencapaian setiap pemerintahan, termasuk 9 tahun dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tapi kita harus jujur mengakui masih banyak ketertinggalan, kelemahan, dan kekurangan yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai bangsa. Janji pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya tunai.

Bung Hatta telah menegaskan "Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat". Bung Karno juga menegaskan: "Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita dari kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial!". "Tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka".

Namun kenyataannya Cita-cita para Pendiri Bangsa belum tercapai. Masih banyak rakyat Indonesia yang sejak lahir hingga meninggal dalam keadaan miskin. Pemerintah, belum sanggup sepenuhnya memenuhi amanat konstitusi secara maksimal yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Realitas menunjukkan masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, gizi buruk, kesulitan pangan, putus sekolah, dan menganggur. Rakyat miskin masih 25,9 juta jiwa, 115 juta jiwa rakyat masuk kategori rentan miskin. Jumlah rakyat menganggur 7,99 juta jiwa. Jutaan jiwa ini bukan sekedar angka statistik, tetapi berkaitan dengan martabat dan kehormatan manusia yang ingin dibebaskan oleh kemerdekaan sehingga menjadi manusia yang merdeka mahardika.

Melalui Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, maka dapat memberikan pemahaman bagaimana peluang dan tantangan besar yang akan kita hadapi sebagai satu kesatuan bangsa ke depan. Fraksi PKS memiliki pandangan yang sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden terkait dengan konteks kepemimpinan nasional bahwa ada tanggung jawab besar yang harus diemban dan ditunaikan serta masih banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.

Peringatan Kemerdekaan agar tidak hanya sekedar menjadi peringatan rutinitas seremonial tapi perlu untuk disertai dengan pemaknaan apa yang menjadi nilai-nilai mendasar dan pondasi berbangsa dan bernegara Indonesia. Memasuki usia 78 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan sembilan tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita masih diliputi oleh persoalan-persoalan ekonomi yang fundamental. Bonus demografi jika tidak dikelola dan dipersiapkan dengan baik maka pada masa

puncaknya dikhawatirkan dapat menjadi bencana demografi di mana jumlah pengangguran yang tinggi, daya saing dan produktifitas rendah.

Pada usia 78 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia mari kita bersama-sama merenung dan mengingat kembali apa yang menjadi tujuan dari bernegara kita. Selama 78 tahun apa yang telah kita sumbangsihkan untuk negara tercinta ini. Apa capaian dan prestasi yang telah kita torehkan selama ini. Usia 78 tahun bukanlah usia yang muda, setidaknya, 22 tahun lagi republik kita akan menginjak usia satu abad atau 100 Tahun. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi penerus bangsa kedepan. Apa yang ingin dikenang oleh anak cucu kita pada 1 Abad nanti. Bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045 dan 5 besar kekuatan ekonomi dunia.

Fraksi PKS sangat optimis dan percaya bahwa dengan semangat Kemerdekaan RI semua tantangan dan permasalahan tersebut dapat diatasi semua selama kita bersatu, bergotong-royong, dan bahu-membahu sebagai satu kesatuan anak bangsa. Selama kita memiliki mimpi, cita-cita, dan tujuan yang sama maka semua energi anak bangsa akan tertuju ke sana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga, APBN 2024 yang akan kita bahas nanti harus mengarah dan sampai kepada tujuan-tujuan tersebut. APBN 2024 harus dapat menstimulus dan berkontribusi optimal serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi PKS memandang secara umum bahwa RAPBN tahun 2024 yang diajukan masih menunjukkan belum ada yang istimewa dari target Pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonominya. RAPBN tahun 2024 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.

Selanjutnya Fraksi PKS akan menyampaikan catatan-catatan secara khusus sebagai berikut:

Asumsi Makroeekonomi

1. Fraksi PKS berpandangan bahwa APBN 2024 merupakan tahapan akhir dari pemenuhan berbagai target RPJMN 2019-2024. Banyak indikator ekonomi, sosial, hingga lingkungan yang gagal dicapai pemerintah sehingga cita-cita kesejahteraan rakyat yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 masih jauh api dari panggang. Kegagalan tersebut pada akhirnya bukan hanya memengaruhi kesejahteraan tetapi juga menghambat Indonesia untuk bertransformasi menuju negara berpendapatan tinggi (*high income country*). Jika demikian, Indonesia dikhawatirkan akan terus berada pada kategori negara

berpendapatan menengah (*middle income trap*) dalam jangka yang panjang. Dalam bahasa yang sederhana, "rakyat tua sebelum kaya".

2. Fraksi PKS berpandangan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi kita belum memadai untuk mencapai harapan yang lebih tinggi. Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2 persen, maka pertumbuhan ekonomi kita dalam satu dekade stagnan dibawah 5 persen, dengan rerata dari 2014-2024 hanya 4,2 persen. Angka ini jauh dari optimisme Presiden Jokowi di awal menjabat yaitu meroket 7 persen, bahkan belum pernah menyentuh target yang direncanakan RPJMN hingga akhir 2024 yaitu di angka 6-6,2 persen. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, rasanya semakin sulit untuk mencapai target menjadi negara maju dan rakyat berpendapatan tinggi pada Indonesia Emas 2045.
3. Fraksi PKS merinci kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sejak beberapa tahun terakhir. RPJMN 2019-2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,7-6 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2019-2022 hanya rata-rata 2,21 persen per tahun. Artinya, margin antara realisasi dan target sangat lebar. Selain target pertumbuhan ekonomi agregat, RPJMN 2019-2024 menetapkan target pertumbuhan, baik dari produksi maupun sisi pengeluaran. Dari sisi produksi, RPJMN menetapkan target pertumbuhan industri pengolahan 6,2-6,5 persen (realisasi 1,42 persen per tahun selama 2019-2022); pertanian sebesar 3,8-3,9 persen (realisasi 2,41 persen); perdagangan sebesar 6-6,3 persen (realisasi 1,85 persen); jasa keuangan sebesar 6,8-7,2 persen (realisasi 3,8 persen); informasi dan komunikasi sebesar 8,3-8,9 (realisasi 8,93 persen) persen; konstruksi sebesar 6,1-6,4 persen (realisasi 1,77 persen) dan pertambangan sebesar 1,9-2 persen (realisasi 1,09 persen).

Pada sisi pengeluaran, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah (LNPR) tangga sebesar 5,4-5,6 persen (realisasi belanja rumah tangga hanya tumbuh 2,24 persen per tahun sedangkan LNPR tumbuh 3,52 persen); konsumsi pemerintah sebesar 4,7-4,9 persen (realisasi 3,34 persen); investasi sebesar 6,6-7 persen (realisasi 1,35 persen); ekspor sebesar 4,7-4,9 persen (realisasi 6,79 persen) dan impor 4,7-4,8 persen (realisasi 0,99 persen). Data-data di atas mengonfirmasi berbagai kegagalan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan sektoral dan sisi pengeluaran. Hal itulah yang menyebabkan kesejahteraan tidak kunjung membaik, bahkan memburuk.

4. Fraksi PKS kembali mendorong pemerintah untuk dapat mencapai target ekonomi tahun 2024. Tahun 2024, RPJMN 2019-2024 mematok pertumbuhan ekonomi lewat dua batas yaitu: batas bawah 6,2 persen dan batas atas 6,5 persen. Dengan skenario bawah maka pendapatan per kapita Indonesia mencapai US\$5.810 sedangkan pada skenario tinggi mencapai US\$6.000. Desakan untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pencapaian target kualitas yang semakin tinggi untuk mengompensasi kegagalan yang selama ini terjadi.
5. Fraksi PKS berpandangan target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tahun 2024 terlalu rendah sehingga gap-nya dengan target RPJMN 2019-2024

semakin lebar. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk menetapkan target yang lebih tinggi. Target yang lebih tinggi memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan investor sehingga mendorong mereka lebih optimis ke depan. Dengan demikian, pihak-pihak tersebut dapat memacu produksi sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja. Pada bagian lain, pemerintah terlalu pesimis dengan kinerja ekonomi nasional tahun depan. Padahal, tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen.

6. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memanfaatkan perbaikan ekonomi global tahun 2024. Berbagai lembaga internasional memproyeksi ekonomi dunia cenderung membaik pada 2024. Perbaikan tersebut tercermin dari proyeksi peningkatan pertumbuhan perdagangan dunia, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang. Untuk menangkap peluang tersebut, pemerintah perlu mempercepat perbaikan ekspor. Selain itu, berbagai upaya memperbaiki iklim investasi harus segera dilakukan sehingga investasi bisa meningkat sejalan dengan peningkatan peluang di global.
7. Fraksi PKS berpandangan pentingnya untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan inklusif. Dengan pertumbuhan inklusif maka pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu tetapi dapat terdistribusi ke seluruh golongan, terutama rakyat terbawah. Sayangnya, hal itu masih sulit direalisasi karena terkonsentrasinya sumberdaya ekonomi pada golongan atas. Kondisi yang demikian menyebabkan ketimpangan pendapatan tidak kunjung membaik. Pada bagian lain, tingkat kemiskinan pun sulit turun karena peluang pekerjaan bagi kelas menengah ke bawah sangat terbatas.
8. Fraksi PKS mencermati tingkat kemiskinan kita masih sangat tinggi dan tidak bergeser banyak dari 10 tahun silam, apalagi setelah dihantam pandemi selama 3 tahun. Terdapat 9,36 persen rakyat atau sebesar sebesar 25,90 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan dan 1,12 persen berada pada kemiskinan ekstrem (Maret 2023). Sejalan dengan itu, angka pengangguran terbuka 5,45 persen pada Februari tahun 2023. Di sisi lain, tenaga kerja kita mayoritas 60 persen didominasi oleh tenaga kerja informal dan berpendidikan rendah. Potret tenaga kerja Indonesia juga masih dominan di sektor tradisional dengan upah yang rendah. Selain itu, perkembangan digitalisasi dan otomasi yang berlangsung masif dan cepat juga berpotensi menimbulkan disrupsi pada kompetensi dan pasar tenaga kerja. Kalau tidak cepat diantisipasi akan berpotensi semakin banyak tenaga kerja menganggur di Republik ini dan dapat menjadi bencana demografi.
9. Fraksi PKS mencermati pernyataan Presiden Jokowi yang telah menyampaikan perkiraan dalam 10 tahun ke depan, pendapatan per kapita kita akan mencapai 10.944 dolar AS atau Rp153 juta dan dalam 22 tahun (tahun 2045) pendapatan per kapita kita akan mencapai 25.025 dolar AS atau Rp331 juta, sehingga masuk kategori negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Tapi realitasnya dalam hampir sepuluh tahun terakhir pendapatan per kapita kita hanya sebesar 4.580 dolar AS, hanya naik 1.048 dolar AS dari 3.531 dolar AS tahun 2014. Dalam hampir satu dekade hanya naik sepertiga. Padahal pada periode Presiden SBY sebelumnya, rata-rata pendapatan per kapita rakyat

Indonesia telah naik 3 kali lipat dari tahun 2004 sebesar 1.161 dolar AS menjadi sebesar 3.531 dolar AS tahun 2014. Seharusnya jika standar 3 lipat kenaikan bisa dilanjutkan pendapatan per kapita tahun 2024 sudah mencapai 10.593 dolar AS dan sudah mendekati menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju.

10. Fraksi PKS berpandangan target pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus tinggi karena perannya yang besar dalam pembentukan output nasional. Terpenting dari itu, konsumsi rumah tangga harus didukung oleh stabilitas inflasi agar daya beli rakyat terjaga. Selain itu, pemerintah harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar konsumsi rumah tangga meningkat. Sayangnya, pemerintah belum mampu memenuhi hal tersebut. Penurunan angka pengangguran pun lebih dipengaruhi oleh penyerapan tenaga kerja pada sektor informal. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk mengurangi kebijakan-kebijakan yang menguras daya beli agar konsumsi rumah tangga bisa tumbuh tinggi tahun 2024. Hal ini sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tercapai. Berbagai kebijakan sebelumnya yang kontraproduktif terhadap daya beli telah menyebabkan ekonomi melambat karena daya beli rakyat turun.
11. Fraksi PKS berpandangan peran pemerintah terhadap PDB masih sangat rendah padahal utang terus meningkat. Triwulan II-2023, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya 7,51 persen yang jauh dari nilai potensialnya. Jika mengikuti kalkulasi sederhana melalui rasio realisasi APBN terhadap PDB, kontribusi belanja pemerintah minimal 13 persen. Fraksi PKS menilai banyak persoalan yang terjadi pada upaya-upaya meningkatkan peran belanja pemerintah, mulai dari komposisi belanja negara yang tidak ideal, birokrasi yang lambat, korupsi hingga masalah perencanaan dan realisasi yang buruk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi PKS, beberapa persoalan yang menyebabkan rendahnya peranan belanja pemerintah adalah penganggaran *business as usual* sehingga dampak belanja terhadap perekonomian rendah dan terbatas; kualitas belanja buruk yang terpantau dari Silpa dan daya serap anggaran menumpuk di akhir tahun; dominasi belanja birokrat dibandingkan belanja produktif (belanja modal); hingga persoalan tata kelola dan korupsi.
12. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja agar peranannya sebagai *shock absorber* dan *countercyclical* semakin meningkat. *Shock absorber* mendorong belanja yang menjangkau dan melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Akan tetapi, kondisi belanja pemerintah belum membaik karena berbagai persoalan seperti overspending, *misspending*, *underspending* dan *fraudspending*. Tantangan lainnya adalah realisasi belanja yang tidak merata dan proporsional karena menumpuk di akhir tahun. Beberapa persoalan yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja realisasi belanja: (i) blokir anggaran (khususnya *automatic adjustment*) sehingga realisasi mandek; (ii) perubahan dan ketidakterediaan regulasi seperti pedoman umum/petunjuk teknik serta SK pengelolaan keuangan yang terlambat bahkan tidak terbit; (iii) perubahan birokrasi (khususnya pada aspek

struktur organisasi dan tata kerja); dan (iv) perencanaan yang buruk (tidak mampu mengidentifikasi program-program berdasarkan waktu realisasi).

13. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam belanja K/L. Pemerintah telah menargetkan penggunaan 40 persen produk UMKM dalam belanja K/L perlu dipastikan pencapaiannya dan dapat terus ditingkatkan. Selain mendukung UMKM dan industri dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri juga mengurangi defisit neraca transaksi berjalan yang pada gilirannya menjaga stabilitas nilai tukar.
14. Fraksi PKS berpandangan Indeks Persepsi Korupsi terus mengalami tren pemburukan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di periode kedua pemerintahan Jokowi. IPK Indonesia posisi 110 dari 180 negara dengan skor 34 turun dari tahun sebelumnya skor 38 (2022). Banyak pejabat yang menjadi tersangka dan terpidana korupsi (5 menteri dan puluhan pejabat) dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar hingga triliunan. Hal ini masih menunjukkan tingginya moral hazard dan kebocoran anggaran yang semestinya bisa direduksi sehingga dapat mempercepat kemajuan bangsa.
15. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk terus mereduksi kasus korupsi di Indonesia. Korupsi yang terus terjadi menyebabkan ekonomi terpuruk. Sumberdaya ekonomi dikuras oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerugian yang disebabkan korupsi tersebut sangat besar yang menyebabkan inefisiensi perekonomian dan pada akhirnya membebani rakyat. Indeks persepsi korupsi di Indonesia terus memburuk. Tahun 2022, peringkat persepsi korupsi di Indonesia 110 dari 180 negara (turun 4 poin dari 2021); Malaysia peringkat 61; Vietnam 77; Filipina 116; Thailand 101 dan Singapura 5.
16. Fraksi PKS kembali mendorong pemerintah untuk memacu investasi karena berperan penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Perbaikan iklim berusaha masih terkendala sehingga menciptakan biaya berusaha mahal. Jika tidak diperbaiki, investasi semakin tidak nyaman dan memindahkan usahanya ke negara lain. Tingginya biaya berusaha di Indonesia dilihat dari angka ICOR. Tahun 2022, ICOR Indonesia di atas 6,5 persen yang jauh di atas negara-negara sekawasan. ICOR 6 bermakna bahwa untuk menghasilkan satu *output* dibutuhkan kapital 6 kali lipat sehingga sangat mahal bagi produsen. Ketika ICOR negara lain 3 maka biaya produksi di Indonesia jauh lebih mahal (dalam memproduksi barang tertentu). Fraksi PKS mengidentifikasi beberapa hal yang menyebabkan tingginya ICOR di Indonesia seperti kualitas sumberdaya manusia, logistik yang buruk, proses perizinan yang berbelit-belit.
17. Fraksi PKS berpandangan agar pemerintah memacu realisasi penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pada RPJMN 2019-2024, target pertumbuhan investasi mencapai 6,6-7 persen yang hanya terealisasi 1,35 persen. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi PMTDDB terhadap pembentukan output menurun. Selain itu, penyerapan tenaga kerja pun semakin tipis. Tahun 2019, kontribusi PMTDDB terhadap PDB mencapai 32,35 persen sedangkan pada triwulan II-2023 hanya 27,9 persen. Pada komponen PMTDDB, penurunan tertinggi terjadi pada kontribusi bangunan, yang turun dari 24,26 persen (2019) menjadi 20,77 persen (triwulan II-2023).

18. Fraksi PKS berpandangan agar pemerintah meningkatkan kinerja neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor. Dengan peningkatan ekspor maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan ekspor seperti kualitas ekspor yang masih didominasi oleh bahan-bahan mentah, jangkauan ekspor yang masih terkonsentrasi pada 13 negara tradisional hingga Kerjasama perdagangan yang tidak menguntungkan. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk berjuang dalam menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan perdagangan yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya pada komoditas-komoditas strategis. Berbagai penolakan dan hambatan dari negara lain harus menjadi pelajaran bagi Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas ekspor.
19. Fraksi PKS terus mendorong pemerintah untuk membangun industri-industri berbasis bahan baku domestik sebagai upaya untuk mengurangi kebergantungan impor. Sebagaimana diketahui, sebagian besar impor Indonesia untuk kebutuhan bahan baku/penolong industri. Jika tidak mampu mengembangkan industri berbasis bahan baku domestik maka ekonomi Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain. Fraksi PKS juga kembali menegaskan pentingnya diversifikasi sumber penggunaan energi primer khususnya sumber energi energi alternatif. Hal ini sangat krusial untuk mengurangi defisit neraca migas yang terus meningkat. Impor migas yang naik akan menyebabkan neraca perdagangan tertekan dan memengaruhi neraca transaksi berjalan secara keseluruhan. Pada bagian lain, kebergantungan terhadap impor bahan bakar menyebabkan ekonomi sulit tumbuh tinggi karena semakin mahalnya harga bahan bakar.
20. Fraksi PKS berpandangan pentingnya pemerintah untuk fokus pada perbaikan di sektor pertanian untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Tantangan krisis pangan, El Nino, kekeringan dan beberapa negara yang menutup ekspor pangan menjadi tantangan yang serius untuk ketersediaan pangan rakyat kedepan. Berbagai masalah muncul di sektor ini harus diatasi secara serius mulai dari ketersediaan lahan yang terbatas, konversi lahan pertanian yang massif, pupuk yang langka dan mahal, pembiayaan yang terbatas hingga kesejahteraan petani yang rendah. Dengan berbagai masalah yang dihadapi sektor pertanian, sektor tersebut masih menyerap hampir 30 juta tenaga kerja. Selain menyerap tenaga kerja, sektor pertanian menjadi penentu pemenuhan pangan nasional. Sektor pertanian juga menjadi lumbung kemiskinan dan ketimpangan. Subsektor tanaman pangan hanya tumbuh rata-rata 0,1 persen per tahun sepanjang 2019-2022 sedangkan tanaman hortikultura 3,4 persen; tanaman perkebunan 3,1 persen; peternakan 2,6 persen; jasa pertanian dan perburuan 2 persen; kehutanan dan penebangan kayu 0,1 persen; dan perikanan 4 persen. Dari sisi kontribusi terhadap PDB, tahun 2019 sektor tersebut masih mengisi 12,71 persen dan menjadi 12,4 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB turun 0,94 persen. Penurunan kontribusi PDB subsektor tanaman pangan besar, padahal pada subsektor tersebut banyak rakyat petani gurem.

21. Fraksi PKS mengkhawatirkan performa sektor pertanian yang terus memburuk. Data BPS menunjukkan bahwa luas panen padi di Indonesia terus menurun. Tahun 2018, luas panen mencapai 11,37 juta hektar yang menurun menjadi 10,41 juta hektar. Penurunan tersebut mencapai 8,13 persen yang sebagian besar karena alih fungsi lahan menjadi bangunan atau perumahan. Sementara itu, produktivitas lahan produksi padi masih bergerak di sekitar 52 kuintal/hektar. Produksi padi Indonesia pada 2018, produksi padi mencapai 59,2 juta ton yang menurun sebesar 4,45 juta ton pada 2022. Pada tahun tersebut produksi padi mencapai 54,74 juta ton. Berbagai data tersebut harus menjadi perhatian pemerintah ditengah-tengah peningkatan jumlah penduduk dan risiko perubahan iklim.

22. Fraksi PKS berpandangan pentingnya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di sektor industri dan melaksanakan transformasi struktural secara serius untuk menahan penurunan kinerja yang menyebabkan deindustrialisasi yang semakin cepat sehingga menyusutkan lapangan kerja sektor formal. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB turun signifikan. Tahun 2019, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 19,7 persen; yang turun menjadi 18,25 persen pada triwulan ii-2023 atau turun hingga 1,45 persen sepanjang periode tersebut. Kontribusi industri pengolahan non migas turun dari 17,58 persen. Hampir seluruh subsektor industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi kecuali industri logam dasar dan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang naik 0,17 persen dan 0,02 persen sepanjang 2019-2023: II.

Penurunan kontribusi tertinggi terjadi pada Industri Tekstil dan Pakaian Jadi mencapai 0,27 persen sepanjang 2019-2023: II. Hal ini disebabkan oleh serangan impor dari China. Penurunan kontribusi industri pengolahan tembakau turun 0,23 persen; industri alat angkutan turun 0,21 persen; industri karet, barang dari karet dan plastik turun 0,16 persen; industri barang galian bukan logam turun 0,15 persen. Kontribusi industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya turun 0,13 persen; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik turun -0,12 persen; Industri Furnitur turun 0,05 persen; Industri Mesin dan Perlengkapan turun 0,04 persen; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki turun 0,04 turun; Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan turun 0,03 persen dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman turun 0,02 persen.

23. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk fokus pada peningkatan kapasitas usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Salah satu persoalan mendasar dari UMKM adalah ketersediaan data yang selama ini dipertanyakan akurasi. Ketika data tidak tersedia maka program-program pemberdayaan tidak tepat sasaran. Jumlah UMKM yang naik kelas sangat terbatas. Hal itu terlihat dari perkembangan unit usaha UMKM yang terus bertambah setiap tahun. Data yang tersedia menunjukkan bahwa tahun 2019 unit usaha UMKM mencapai 65,4 juta yang naik hingga 1,27 juta. Unit usaha mikro mencapai 64,6 juta pada 2019 yang naik 1,25 juta dibandingkan

2018. Unit usaha kecil dan menengah pada 2019 masing-masing 798 ribu dan 65 ribu. Kedua jenis usaha tersebut masing-masing naik 15,5 ribu dan 4,76 ribu. Sementara itu, unit usaha besar pada 2019 mencapai 5,63 ribu yang naik 87 dibandingkan 2018. Persoalan lain yang harus diselesaikan seperti peningkatan kapasitas, dukungan pembiayaan hingga akses pasar. Pada sisi pembiayaan, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas KUR dalam mendukung UMKM bukan hanya dari sisi permodalan tetapi juga produktivitas.

24. Fraksi PKS berpandangan pemerintah perlu untuk menetapkan target inflasi yang lebih rendah terutama menjaga inflasi pangan bergejolak dan inflasi energi. Hal ini ditujukan untuk menjaga daya beli rakyat tahun depan. Tahun 2022 inflasi energi dan bahan makanan masing-masing 16,88 persen dan 5,59 persen telah memukul daya beli rakyat. Angka inflasi 2,8 persen 2024 masih cukup tinggi karena kecenderungan ekonomi global yang mulai pulih. Pada bagian lain, inflasi di dalam negeri mulai melambat sejak kenaikan tahun lalu. Selain itu, inflasi yang lebih rendah dapat menjadi dorongan bagi sektor keuangan untuk mengoreksi suku bunga kredit lebih cepat. Pemerintah pun bisa menekan *yield* yang lebih rendah jika inflasi bergerak di bawah 2 persen.
25. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah untuk menetapkan inflasi bahan makanan sebagai asumsi makroekonomi. Inflasi ini sangat penting karena sebagian besar pendapatan rakyat untuk memenuhi bahan makanan. Selain itu, inflasi bahan makanan merupakan inflasi yang naik cukup tinggi dan rata-rata di atas inflasi lainnya. Inflasi bahan makanan yang rendah dan stabil mencerminkan kekuatan daya beli rakyat. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa inflasi bahan makanan yang rendah bukan karena impor tetapi karena produksi yang mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini lah yang harus menjadi target pemerintah ke depan.
26. Fraksi PKS mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia (baik di pusat maupun kantor perwakilan daerah) untuk menekan inflasi sisi penawaran. Inflasi ini sangat liar dan sangat menekan daya beli rakyat khususnya golongan menengah ke bawah. Bank Indonesia perlu berkontribusi dalam menyumbat sumber-sumber inflasi regional sebagai salah satu jalur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diamanatkan UU PPSK, Bank Indonesia harus mengarahkan kebijakannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak Bank Indonesia tidak hanya fokus pada inflasi permintaan (inti) yang saat ini sudah cukup terjaga. Perlu upaya-upaya *massive* untuk menekan inflasi sisi penawaran. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID tidak hanya forum semata tetapi harus mampu merumuskan dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan pengendalian inflasi di daerah. Berbagai rapat yang digelar di hotel-hotel mewah sangat jauh dari marwah pengendalian inflasi di daerah. Padahal, biaya-biaya rapat tersebut sudah cukup untuk operasi pasar murah di daerah.
27. Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia untuk menekan inflasi di desa. Inflasi di desa telah menggerogoti daya beli petani yang sudah rendah. Nilai tukar petani bergerak lambat yang mencerminkan

bahwa penghasilan petani dari pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Fraksi PKS juga mempertanyakan kemampuan Bank Indonesia dalam memengaruhi pergerakan suku bunga kredit. Fraksi PKS melihat bahwa transmisi kebijakan moneter (jalur suku bunga) ke sektor perbankan lamban sehingga berpengaruh terhadap penyaluran kredit dan investasi. Dengan lambannya transmisi tersebut maka ekonomi kekurangan likuiditas. Fraksi PKS juga mendesak Otoritas Jasa Keuangan untuk fokus pada kondisi likuiditas perbankan di daerah. Menurut data OJK, beberapa provinsi mengalami keterbatasan likuiditas yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di atas 100. Bahkan, beberapa provinsi memiliki LDR hingga 120. OJK perlu menyelesaikan hal ini.

28. Fraksi PKS mencermati nilai tukar sebesar Rp15.000 mencerminkan bahwa daya saing ekonomi nasional relatif rendah. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak berani menetapkan nilai tukar yang lebih kuat. Padahal, nilai tukar sangat penting bagi pemerintah, swasta dan dunia usaha. Kegagalan mencapai nilai tukar menyebabkan anggaran cicilan bunga dan pokok utang pemerintah dan swasta melambung. Hal itu terlihat pada 2022 ketika Rupiah terdepresiasi sangat dalam. Sektor swasta juga mengharapkan stabilitas Rupiah untuk mendukung bisnisnya, khususnya pada pembayaran bunga utang. Sementara itu sektor industri membutuhkan Rupiah yang lebih kuat untuk kebutuhan impor. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan cadangan devisa yang digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Cadangan devisa Indonesia sangat dibandingkan dengan negara-negara sekawasan seperti Thailand dan Korea Selatan. Cadangan devisa yang rendah tidak akan mampu menjaga Rupiah lebih kokoh.
29. Fraksi PKS juga mendorong Bank Indonesia untuk memperdalam pasar keuangan valas agar nilai tukar Rupiah bisa lebih stabil. Pasar keuangan valas Indonesia sangat rendah karena keterbatasan instrumen-instrumen investasi. Hal tersebut menyebabkan investor cenderung keluar lewat repatriasi keuntungan. Setiap tahunnya, pendapatan investor yang keluar dari Indonesia lebih dari US\$30 miliar (tahun 2021 dan 2022). Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mempercepat perbaikan neraca jasa karena defisitnya semakin tinggi. Tahun 2019, defisit neraca jasa hanya US\$7,78 miliar yang meningkat hingga mencapai US\$20,3 miliar pada 2022. Kenaikan defisit neraca jasa akan menekan neraca transaksi berjalan dan nilai tukar. Fraksi PKS juga mendorong Bank Indonesia untuk menetapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai kebijakan bank sentral lain yang menyebabkan depresiasi Rupiah. Tahun 2023, kebijakan the Fed menaikkan suku bunga acuan menyebabkan Rupiah tertekan karena terjadi capital outflow baik di pasar uang maupun pasar obligasi.
30. Fraksi PKS berpandangan pemerintah perlu menetapkan suku bunga SBN yang lebih rendah. Angka 6,7 persen sangatlah tinggi sehingga membebani APBN. Pada Juli 2023, suku bunga SBN 10 tahun bergerak pada level 6,22 persen. Dengan angka yang demikian, pemerintah seharusnya bisa menetapkan suku bunga SBN yang lebih rendah sebagai langkah untuk menekan ekspektasi investor terhadap suku bunga yang lebih tinggi. Pada bagian lain, ekonomi

global tahun depan diproyeksi lebih aman sehingga gejolak lebih terkendali. Selain itu inflasi global dan Indonesia pun sudah turun. Fraksi PKS menekankan bahwa penetapan suku bunga SBN bukan hanya angka semata. Kegagalan menetapkan angka yang lebih rendah menyebabkan beban fiskal semakin mahal. Fraksi PKS menekankan bahwa belanja pemerintah pusat untuk belanja cicilan bunga utang sudah lebih dari 15 persen. Jika tidak terkendali, belanja tersebut bisa menyita belanja lain.

31. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk fokus mengendalikan berbagai faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SBN. Faktor-faktor yang dimaksud adalah (i) kenaikan risiko yang tercermin dari *credit default swap* (CDS), (ii) risiko fiskal, khususnya kenaikan utang maupun *fiscal space*, (iii) kenaikan inflasi yang menyebabkan suku bunga cenderung tinggi; (iv) faktor stabilitas nilai tukar.
32. Fraksi PKS memandang target minyak bumi di angka 625 ribu barel per hari masih rendah dan cenderung pesimis dan hanya mengikuti tren penurunan lifting minyak yang setiap tahun terjadi tanpa ada daya upaya yang serius serta semangat dari Pemerintah. Ini bertentangan dengan visi Pemerintah tentang lifting minyak yang selama ini didengungkan-dengungkan akan mencapai 1 juta barel di tahun 2030. Target lifting minyak kita tahun 2024 dibuat lebih rendah dari angka 660 ribu barel yang merupakan target tahun 2023, menjadikan kemungkinan di tahun 2030 kita akan bisa produksi 1 juta barel semakin kecil. Dengan visi 1 juta barel, Pemerintah harus buat terobosan dengan aktivitas eksplorasi dan penemuan sumur baru dengan cadangan yang besar

Indikator Kesejahteraan Sosial

33. Fraksi PKS memandang selama hampir 10 tahun kepemimpinan nasional pengentasan kemiskinan amat lambat. Ketika awal Presiden Joko Widodo memimpin, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,59 juta jiwa (Maret 2015), menjelang masa jabatan presiden berakhir Maret 2023 penduduk miskin masih berjumlah 25,90 juta jiwa. Selama 10 kepemimpinan nasional hanya 2,69 juta jiwa rakyat yang keluar dari kemiskinan atau rata-rata hanya turun 299.000 jiwa per tahunnya. Selain itu juga pemerintah harus mewaspadai sejumlah 115 juta jiwa rakyat Indonesia yang masuk kategori rentan miskin menurut data Bank Dunia. Fraksi PKS berpendapat terkait target tingkat kemiskinan pada RAPBN 2024 sebesar 6,5 persen hingga 7,5 persen harus dicapai secara berkualitas. Mengingat kemiskinan di perdesaan angkanya sangat memprihatinkan sebesar 12,22 persen dan kemiskinan di perkotaan sejumlah 7,29% (Maret 2023). Disparitas kemiskinan desa-kota juga kian menganga. Pemerintah harus mengendalikan ketimpangan di perdesaan melalui peningkatan kapasitas SDM dan penguatan ekonomi desa, tidak cukup hanya dengan transfer dana desa semata.
34. Fraksi PKS memandang tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih terlampaui tinggi. Dengan TPT diharapkan ditekan pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen seharusnya pemerintah bekerja keras. Data terakhir jumlah penduduk menganggur sebanyak 7,99 juta jiwa atau 5,45 persen. Sementara itu sebesar

83,34 juta orang atau 60,12 persen masih bekerja pada kegiatan informal pada data Februari 2023. Jumlah Pekerja informal terus meningkat, dengan meningkatnya pekerja informal artinya penciptaan lapangan kerja di Indonesia semakin kurang bermutu. Pekerja informal umumnya tidak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan yang akhirnya tidak mendapatkan jaminan sosial secara penuh, tidak memiliki akses asuransi kesehatan, pensiun, cuti sakit, dan cuti tahunan. Hal itu berdampak pada meningkatnya ketimpangan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia juga masih belum kembali kepada posisi sebelum pandemi Covid-19 sebesar 6,88 juta orang atau 4,99 persen pada Februari 2020. Pemerintah perlu berupaya memperbaiki masalah struktural pada persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

35. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa tingkat pengangguran usia muda di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO). Sulitnya anak muda mendapatkan pekerjaan merupakan keluhan rakyat selama ini. Ini dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda yang tinggi. Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, TPT Pemuda Indonesia mencapai 13,93 persen pada 2022. Artinya 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan pengangguran usia muda. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa tingkat pengangguran usia muda di Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Negara lain seperti Thailand (8 persen), dan Vietnam (8,87 persen), demikian pula Brunei, Philipina, dan Singapura lebih rendah. Data BPS bulan Agustus 2022 menyebut pengangguran paling banyak berasal dari kelompok usia 20-24 tahun, yakni 2,54 juta orang. Angka ini setara 30,12 persen dari total pengangguran nasional. Bercermin pada tingginya pengangguran usia produktif sudah selayaknya momentum perubahan digulirkan, karena jika tidak pengangguran muda akan menjadi bom waktu dikemudian hari.
36. Fraksi PKS berpandangan rasio gini harus ditekan, karena semakin tinggi rasio gini semakin tinggi ketimpangan. Pemerintah sebagai pengendali APBN seharusnya mampu mendorong agar ketimpangan semakin turun. Dengan angka sasaran tahun 2024 antara 0,374 dan 0,377 harusnya sungguh-sungguh bisa dicapai. Rasio gini atau indikator ketimpangan pengeluaran menjelang pemerintahan berakhir kembali naik. Rasio gini pada Maret 2023 mencapai 0,388. Data World Inequality Report 2022 menyebut kelompok 50 persen kelompok terbawah hanya memiliki 4,48 persen dari total kekayaan rumah tangga nasional pada 2021. Sedangkan kelompok 10 persen teratas di Indonesia menguasai 61,3% pada 2021. Memburuknya rasio gini disebabkan pendapatan kelompok miskin jauh menurun daripada kelompok kaya. Maka obral insentif mobil listrik di tahun 2024 dengan menggunakan uang rakyat demi mensubsidi golongan mampu, sangat kontradiktif dengan target menurunkan rasio gini. Pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang berkeadilan dan kemaslahatannya dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
37. Fraksi PKS mendorong target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99 sampai 74,02 harus tercapai bahkan seharusnya bisa lebih tinggi. Karena

target IPM pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah sebesar 75,54. Pemerintah harus lebih serius dalam mengevaluasi dan memperbaiki kegagalan pencapaian tersebut. Selain itu, Pemerintah harus mampu memperbaiki kondisi sosial di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah harus menjaga dan meningkatkan efektivitas dana desa, jangkauan listrik, jangkauan keuangan (financial inclusion), serta mendorong realisasi penanaman modal. Selain itu, pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah nasional. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah harus bekerja lebih serius guna merealisasikan target IPM. Dalam Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2022 menunjukkan bahwa daya saing SDM Indonesia menurun, tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 70 kemudian menjadi peringkat 82 pada tahun 2022 dari 133 negara. Tertinggal jauh dari Brunai (41) dan Malaysia (45). Indonesia masih dibawah Vietnam, Thailand dan Philipina. Faktor-faktor yang menyebabkan talenta Indonesia kurang bisa bersaing secara global, seperti minimnya professional dengan high skill, produktivitas pekerja, kurangnya sanitasi, kinerja lingkungan, minimnya international student, hingga rendahnya jaminan pensiun.

38. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki Nilai Tukar Petani (NTP) baik dari sisi kuantitas ataupun sisi kualitasnya. Target yang dipatok untuk tahun 2024 yaitu NTP 105-108. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Juni 2023 sebesar 110,41 atau naik tipis 0,19 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Menjadi catatan Fraksi PKS adalah nilai tukar petani tanaman pangan atau padi selalu lebih rendah dibandingkan NTP petani secara umum. Artinya memang petani padi masih menjadi kelompok yang paling rendah NTP nya dibanding petani lainnya. Petani padi justru paling rendah kesejahteraanya. Demikian pula, biaya produksi beras Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara produsen beras (China, India, Vietnam, Thailand, Philipina). Komponen biaya termahal adalah sewa lahan dan biaya tenaga kerja. Harga pupuk Indonesia pun termahal, hanya lebih murah dari India. Dengan biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi di antara negara produsen menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.
39. Fraksi PKS berpandangan pentingnya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditargetkan pada kisaran 107 -110. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan yang terjadi di keluarga nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga non nelayan dimana tingkat kemiskinan di rumah tangga nelayan adalah sebesar 12,3 persen sedangkan tingkat kemiskinan bukan keluarga nelayan adalah 9,4 persen. Dari 9,8 juta penduduk dari keluarga nelayan, 1,1 juta (12,3 persen) diantaranya tergolong kedalam kelompok penduduk miskin. Nelayan Indonesia juga kalah produktif dari Malaysia, hasil tangkapan Nelayan Indonesia rata-rata sekitar 4,33 kilogram ikan per hari. Jauh bila dibandingkan dengan nelayan Malaysia yang bisa mendapatkan ikan di wilayah laut mereka hingga sekitar 300 kilogram per hari. Nelayan Indonesia didominasi pendidikan yang rendah dan teknologi yang terbatas. Karena kemiskinan dan produktifitas yang rendah menjadikan BBM, alat tangkap nelayan, dan perbekalan logistik untuk melaut

sulit dijangkau dan dianggap mahal. Masih banyak nelayan berangkat dengan perahu dan bahan bakar pinjaman.

Penerimaan Negara

40. Fraksi PKS mencermati bahwa struktur penerimaan perpajakan masih belum banyak berubah sejak hampir dua dekade terakhir. Di mana, sumber daya alam berperan signifikan terhadap capaian kinerja penerimaan. Tercatat sejak tahun 2007, penerimaan perpajakan mengalami tiga kali realisasi yang melebihi target yakni pada 2008, 2021, dan 2022. Pada tahun-tahun tersebut, penerimaan perpajakan didorong utamanya karena ledakan komoditas, utamanya batu bara dan *Crude Palm Oil* (CPO). Pada tahun 2008, harga batu bara bahkan meningkat lebih hingga 400 persen sejak tahun 2000. Demikian halnya yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yang merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah.
41. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan yang melampaui target, di tengah masih besarnya ketergantungan kita pada ekspor sumber daya alam justru perlu diwaspadai. Sebab ini menandakan bahwa pemerintah belum dapat meraih sumber-sumber penerimaan perpajakan yang berkelanjutan. Contohnya adalah pada tahun 2021 dan 2022. Meski realisasi melampaui target, namun target tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan sebelum pandemi. Demikian halnya realisasi pada 2022 yang belum mampu melampaui kinerja tahun 2019. Padahal, pada dua tahun terakhir, komoditas berada pada tingkat harga tertinggi sepanjang sejarah. Artinya, sebenarnya masih ada ruang yang sangat lebar untuk dapat meraup penerimaan perpajakan lebih tinggi lagi saat itu.
42. Oleh karena itu, di tengah tahun politik 2024, Fraksi PKS mengingatkan bahwa penerimaan perpajakan tetap harus diarahkan untuk memperkuat sumber penerimaan pajak yang berkelanjutan. Celah-celah hilangnya potensi penerimaan harus diantisipasi agar penerimaan perpajakan dapat tetap tumbuh optimal.
43. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk bekerja dengan serius untuk menegakkan reformasi perpajakan. Sampai saat ini, praktis sudah ada dua kali pengampunan pajak, dengan nama yang berbeda, dilakukan untuk memperkuat dan memperluas basis perpajakan. Fraksi PKS mengingatkan bahwa perluasan basis dan data pajak hasil dari pengampunan pajak harus dapat mendorong peningkatan penerimaan perpajakan pada tahun depan. Tax ratio yang masih stagnan dikisaran 10 persen harus menjadi catatan serius belum berhasilnya reformasi perpajakan.
44. Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang bersih dapat benar-benar dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Fraksi PKS melihat bahwa reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan

yang telah digaungkan sejak lebih dari 20 tahun, belum berhasil dalam membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel. Praktik-praktik yang mereduksi kepercayaan wajib pajak terhadap para penegak pajak justru terbongkar.

45. Fraksi PKS terus mendorong perbaikan laporan belanja perpajakan agar transparan, terukur, dan akuntabel. Selain itu, laporan perpajakan harus terus diperkuat dan diperluas agar biaya tercapai transparansi biaya untuk mencapai sasaran kebijakan tertentu. Untuk memperkuat hal tersebut, Fraksi PKS mendorong adanya produk hukum untuk memperkuat standarisasi laporan perpajakan. Sehingga, laporan perpajakan yang dibuat berkala dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah di hadapan DPR.
46. Fraksi PKS mendorong agar dilakukan upaya monitoring dan evaluasi belanja perpajakan, termasuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana ketercapaian tujuan ekonomi yang disasar. Selain itu, pemerintah perlu memilah insentif perpajakan mana yang efektif dalam mencaai tujuan yang ditentukan dan tidak. Sebab, Pemberian insentif perpajakan tanpa adanya monitoring dapat mengakibatkan tidak presisinya estimasi belanja perpajakan.
47. Fraksi PKS terus mendorong agar ke depan evaluasi dampak ekonomi dari belanja perpajakan dapat diperluas hingga mencakup biaya yang dikeluarkan, sejauh mana distribusi kelompok penerima manfaat hingga sejauh mana dampak dari penerimaan tersebut bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pada sektor yang dituju. Fraksi PKS menganggap bahwa pengukuran tersebut sangat penting untuk melihat sejauh mana reformasi perpajakan telah dijalankan.

Belanja Pemerintah Pusat

48. Fraksi PKS memandang bahwa faktor keberuntungan yang menopang perekonomian Indonesia diperkirakan akan berakhir seiring dengan kontraksi ekspor pada triwulan II tahun 2023, APBN dapat menjadi sarana utama kebijakan untuk mengungkit ekonomi melalui belanja pemerintah. Dengan memperhatikan realisasi belanja pemerintah hingga semester I tahun 2023 sekitar 41,7 persen atau Rp1.255,7 triliun terdiri dari belanja Pemerintah Pusat Rp891,6 triliun atau 39,7 persen dan belanja berupa Transfer Ke Daerah Rp364,1 triliun atau 44,7 persen, maka Belanja Pemerintah perlu diarahkan untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan memperhatikan porsi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan PDB yang relatif kecil yaitu di triwulan II biasanya 8-10 persen, dan triwulan IV sekitar 9-11 persen kemudian pola realiasi belanja Pemerintah yang kerap menumpuk di triwulan III dan triwulan IV maka defisit fiskal tidak perlu diperlebar, namun Pemerintah perlu untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
49. Fraksi PKS berpandangan dengan ancaman berkurangnya sumber air di Thailand dan banjir yang melanda di China memberikan risiko menurunnya supply beras dunia. Impor beras Indonesia paling banyak berasal dari Thailand. Negara-negara sekitar China seperti Vietnam dan Kamboja karena kedekatan

jarak ekonomi diperkirakan akan menyalurkan berasnya ke China sehingga diperkirakan dapat mempengaruhi ketersediaan beras Impor Indonesia. Mitigasi Dampak dari perubahan Iklim yang dapat mengakibatkan terjadinya kekeringan dan gagal panen. Kemudian Perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih terjadi juga dapat menjadi di antara faktor pendorong terjadinya kelangkaan sumber pangan dunia. Hal tersebut mendorong stok pangan terbatas kemudian dapat merambat kepada tingginya tingkat inflasi. Fraksi PKS menilai kebergantungan impor Indonesia semakin tinggi. Hal ini sangat berbahaya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Fraksi PKS mendorong program ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang mana hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran pemenuhan anggaran bidang-bidang pembangunan yang bersifat prioritas (antara lain pendidikan, kesehatan, perlintsos, infrastruktur, dan ketahanan pangan). Namun, Fraksi PKS juga mendorong selain fokus pada sektor pertanian juga ketahanan pangan perikanan. Hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait penyuluh perikanan yang jumlahnya sangat jauh dibawah standar. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk secara efisien menggunakan anggaran ketahanan pangan untuk riset dan pengembangan ketahanan pangan afirmatif, pengembangan sistem logistik dan hilirisasi komoditas komoditas strategis dan ekonomis penting.

50. Fraksi PKS mencermati Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen RAPBN tahun 2024. Fraksi PKS berpandangan Pemerintah belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan kinerja anggaran 20 persen APBN untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Kualitas SDM kita masih kalah dan tertinggal dari negara-negara di kawasan. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada posisi 130 dari 199 negara (2022). Indeks Daya Saing Global Indonesia pada posisi 34 dari 64 negara yang dinilai (2023). Skor PISA (Program for Internasional Student Assessment) Indonesia juga masih di bawah rerata OECD dan ASEAN-5. Hal yang sama juga ditunjukkan dari angka partisipasi kasar (APK) untuk perguruan tinggi (19-24 tahun) yang masih tertinggal dibandingkan negara lain. Hal itu menunjukkan *mandatory spending* untuk pendidikan belum optimal kinerjanya.
51. Fraksi PKS tetap mendorong Pemerintah agar senantiasa mengalokasikan anggaran Pendidikan sebagaimana *mandatory spending* 20 persen dari APBN oleh amanat konstitusi secara efektif dan efisien. Dengan alokasi anggaran tersebut, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang memiliki keunggulan komparatif dari sisi jumlah penduduk. Namun kenyataan yang terjadi kualitas sumber daya manusia Indonesia belum dapat bersaing secara optimal di wilayah dan global.
52. Fraksi PKS memandang untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Pemerintah perlu memulai dengan memperkokoh fondasi dari transformasi ekonomi yaitu memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu menyadari bahwa kesempatan memanfaatkan bonus demografi yang terjadi Indonesia semakin pendek. Bonus Demografi diperkirakan akan berakhir di antara tahun 2036 hingga 2037. Kesempatan ini perlu dimaksimalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah struktural jangka

panjang di Indonesia seperti mengubah struktur aktivitas ekonomi berbasis produktivitas rendah ke produktivitas tinggi dan aktivitas ekonomi dengan nilai tambah tinggi. Oleh karena itu kebijakan dibidang Pendidikan sangat penting untuk dimaksimalkan dengan memastikan arah kebijakan Pendidikan yang berorientasi terhadap perbaikan kualitas Pendidikan dan perluasan akses pendidikan serta memperbaiki tata Kelola Pendidikan seperti tata Kelola guru yang masih meysisakan berbagai persoalan. Tujuan pembangunan Pendidikan adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif , merata , dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua , maka pendidikan harus dapat diakses oleh setiap warga negara dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik dan ekonomi.

Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah: (i) Capaian Angka Partisipasi Kasar Pada Jenjang PAUD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi masih tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kemendikbudristek tahun 2020-2024. (ii) Penurunan Angka Putus Sekolah cenderung stagnan oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan Menyusun strategi untuk menekan angka putus sekolah. (iii) Tingginya Kesenjangan antar kelompok ekonomi dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah melakukan: (i) Perbaikan Penyaluran PIP Untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah Dalam penanganan Anak Tidak Sekolah Pemerintah perlu memperbaiki penyaluran PIP terutama kepada keluarga miskin atau rentan miskin dan Anak Tidak Sekolah dengan Pemukhtakhiran DTKS dan Membangun mekanisme untuk inditifikasi anak putus sekolah dan anak tidak sekolah, sosialisasi, konseling dan penjangkuan kepada anak putus sekolah dengan melibatkan masyarakat, sekolah dan pendamping desa. Pemerintah pusat juga perlu membuat mekanisme insentif untuk mendorong pemerintah Daerah menangani Anak tidak sekolah. (ii) a. Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin (Kelompok Pengeluaran Kuintil 1 dan 2) dan Bagi Penyandang Disabilitas. Terutama akses untuk jenjang perguruan tinggi, mengingat kesenjangan APK Perguruan Tinggi antara rumah tangga berpenghasilan rendah (kuintil 1) sebesar 19,46 dengan berpenghasilan tinggi (kuintil 5) sebesar 51,33. Selain itu dari tahun 2020 sehingga tahun 2022 capain APK Perguruan Tinggi tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Kemendikbudristek maupun dalam RPJMN 2019-2024. b. Pengarusutamaan belanja Pendidikan pada penyelesaian kesenjangan. Pemerintah perlu untuk menggunakan anggaran bidang Pendidikan untuk mengurangi kesenjangan baik antarwilayah maupun sosial ekonomi masyarakat. (iii) Selain mendorong peningkatan penyediaan sarana dan prasana pendidikan yang memadai seperti perpustakaan dan ketersediaan buku, pemerintah juga perlu memperbaiki sarana dan prasarana dasar seperti ketersediaan sanitasi dasar. Dari 100 sekolah, hanya 59 Sekolah dasar yang memiliki toilet layak dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2021, terdapat 7 dari 10 sekolah di setiap jenjang Pendidikan memiliki sarana kebersihan dasar. Artinya, masih ada 3 sekolah di setiap jenjang Pendidikan dasar dan menengah yang belum memiliki sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong penuntasan masalah guru honorer, kontrak, pegawai tidak tetap dan non-ASN untuk beralih menjadi ASN PPPK. Penuntasan 1,6 juta guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai legal formal guru profesional. Tercatat sampai 2023 ini terdapat 1,6 juta antrian guru yang belum tersertifikasi.

Kemudian, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah agar memberikan perhatian terhadap penyediaan sumber daya peneliti dan insinyur. Sekitar 70 persen komponen ekosistem riset dan inovasi adalah Modal Insani Peneliti. Maka jumlah dan mutu sumber daya peneliti perlu diperkuat. Jumlah dan mutu sumber daya manusia adalah kunci utama dalam peningkatan riset dan inovasi nasional. Riset yang kuat dapat menghasilkan pelbagai inovasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai game changer dalam melepaskan Indonesia dari perangkap negara penghasil menengah menjadi negara maju. Untuk dapat menyusul laju pertumbuhan ekonomi maka Indonesia perlu meningkatkan jumlah rasio insinyur terhadap jumlah penduduk. Insinyur tersebut dapat berkeja sesuai dengan fokus pemerintah dalam hilirisasi industri dan transisi energi.

53. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar meningkatkan perhatian terhadap anggaran kemiskinan. Kemudian penurunan kemiskinan tidak hanya mengandalkan pendekatan bantuan sosial saja tetapi juga perlu memberdayakan masyarakat miskin agar mandiri. Hal ini memerlukan koordinasi dan aksi stakeholder yang utamanya adalah Pemerintah antar lintas kementerian/ lembaga agar angka kemiskinan ekstrim Indonesia pada 2024 dapat berada di angka nol persen. Kemiskinan ekstrim berhubungan dengan akses terhadap pangan, air bersih, sanitasi, Kesehatan, dan akses informasi terhadap layanan sosial. Sehingga, selain program bantuan sosial, Pemerintah perlu juga membuat program yang berkelanjutan agar masyarakat miskin tersebut dapat mandiri keluar dari kemiskinan dan rentan.
54. Fraksi PKS mendorong secara terus menerus agar kualitas dan kuantitas anggaran belanja kesehatan dapat dijaga kualitas dan kuantitasnya. Paska pencabutan mandatory spending Kesehatan 5 persen melalui UU Omnibus Law Kesehatan, Fraksi PKS memiliki perhatian besar terhadap alokasi anggaran kesehatan. Pemerintah perlu memastikan agar belanja kesehatan mempertimbangkan value of money dan efektifitas dalam capaian kinerja output dan outcome termasuk seperti meningkatkan capaian jumlah orang sakit yang berkurang dan jumlah warga gaya hidup sehat yang bertambah. Pemerintah masih harus terus memperbaiki sistem jaminan kesehatan Nasional agar dapat berkelanjutan. Tiga kriteria penting untuk mengukur pemenuhan hak kesehatan adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan mutu (quality). Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dari Sistem JKN dalam APBN 2024.
55. Fraksi PKS mencermati Alokasi anggaran kesehatan 2024 direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN dan alokasi tahun-tahun sebelumnya sesungguhnya belum membawa perubahan yang signifikan, bagi kualitas layanan Kesehatan. Sektor kesehatan rakyat masih mengidap banyak masalah. Prevalensi stunting (gizi buruk) kita meski terus menurun tapi masih tinggi

berdasarkan standar WHO. Pemerataan kesehatan, ketersediaan dokter tenaga kesehatan dan obat-obatan di daerah terpencil masih bermasalah. Selain itu, belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif dan preventif, yang tecermin masih tingginya persentase puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan dan kelayakan secara peralatan.

56. Fraksi PKS mencermati anggaran bidang ketahanan pangan 2024 yang dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun belum memadai ditengah ancaman krisis pangan kedepan. Pemerintah perlu fokus pada perbaikan di sektor pertanian untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Tantangan krisis pangan, El Nino, kekeringan dan beberapa negara yang menutup ekspor pangan menjadi tantangan yang serius untuk ketersediaan pangan rakyat kedepan. Pemerintah harus serius mewujudkan swasembada pangan nasional yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Berbagai masalah muncul di sektor ini harus diatasi secara serius mulai dari ketersediaan lahan yang terbatas, konversi lahan pertanian yang massif, pupuk yang langka dan mahal, pembiayaan yang terbatas, kesejahteraan petani yang rendah, hingga Impor masih terus dilakukan tanpa memperhatikan musim panen rakyat. Hal yang juga ironis program Food Estate yang diharapkan menjadi lumbung pangan, gagal dilaksanakan di beberapa kawasan sehingga menyisakan kerugian serta kerusakan lingkungan.
57. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah bahwa pencabutan atau pengurangan Subsidi BBM akan memberikan pengaruh yang besar juga bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM dan usaha kecil informal lainnya yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial Pemerintah. Selama ini, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahannya. Apalagi sebelumnya kalangan tersebut juga sudah terkena dampak dari pandemi dan kenaikan harga Minyak Goreng. Kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin terpuruk, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat. Fraksi PKS berpandangan bahwa kebijakan subsidi adalah salah satu bentuk hadirnya negara dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan atau ekonomi lemah.
58. Fraksi PKS mendesak agar dana subsidi energi (listrik, BBM dan LPG 3kg) dialokasikan secara cukup di tahun 2024 sehingga masyarakat tidak mampu yang membutuhkan energi dapat terpenuhi hak-haknya. Apalagi asumsi harga energi di pasar internasional diprediksi akan lebih rendah pada tahun 2024. Hal ini artinya masyarakat harus menikmatinya dengan mendapatkan harga energi yang murah dan terjangkau. Akses energi yang cukup akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar menuntaskan masalah kelangkaan LPG 3kg di sejumlah daerah dalam beberapa pekan, hal ini menunjukkan kian mendesaknya pembenahan tata Kelola LPG subsidi.
59. Fraksi PKS mendesak agar pembangunan jargas rumah tangga menjadi prioritas dan alokasi anggaran di tahun 2024. Pipa Cirebon – Semarang yang lagi dibangun sekarang ini seharusnya dapat dinikmati juga oleh masyarakat yang dilewatinya. Namun bagaimana akan menikmati kalau jaringan gas rumah

tangganya tidak dibangun. Pemerintah sendiri mempunyai target 4 juta jaringan gas sambungan rumah tangga (SR) di tahun 2024. Tahun 2021 Pemerintah baru dapat membangun 662 ribu SR atau baru 16 persen dari target. Tahun 2022 merosot menjadi hanya sebesar 41 ribu SR. Sementara pada tahun 2023 tidak ada alokasi APBN dianggarkan untuk pembangunan Jargas. Padahal waktu yang tersisa tinggal satu tahun ini.

60. Fraksi PKS menolak tegas subsidi mobil listrik seperti yang terjadi di tahun 2023 di Kementerian Perindustrian, di mana sebelumnya tidak ada pembahasan anggarannya di DPR terutama dengan komisi terkait yaitu Komisi VII DPR RI. Hal ini tidak baik dalam proses *budgeting* dan menjadi preseden buruk bagi kebijakan penganggaran kita ke depannya karena ada hak DPR yang berpotensi dilanggar. Kemudian, subsidi mobil ini jelas salah sasaran karena tidak menysasar kepada masyarakat yang kurang mampu. Kalau sepeda motor listrik mungkin masih bisa dipertimbangkan, tentunya dengan skema yang ketat agar dapat menysasar ke masyarakat yang memang membutuhkan.
61. Fraksi PKS memandang anggaran yang dikucurkan untuk IKN terlalu besar dan tidak tepat sasaran. FPKS berpendapat bahwa pembangunan IKN harus ditunda dan menunggu keseriusan investor untuk ikut masuk dan membangun IKN. Sebab bukan tidak mungkin investor yang dijanjikan tidak akan pernah datang, sehingga anggaran yang dikeluarkan pada hari ini dapat menjadi sia sia. Apalagi masih banyak target pembangunan yang belum tercapai.

Fraksi PKS perlu mengingatkan kepada Pemerintah bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, antara lain: Pertama, konektivitas di Kabupaten masih memprihatinkan. Kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota menunjukkan penurunan, dari 67 persen tahun 2021 menjadi 60 persen tahun 2022. Lebih ironis, jumlah kabupaten/kota dengan kemantapan jalan di bawah rata-rata nasional sangat mendominasi, yaitu sebesar 57,58 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2024 harus lebih fokus pada peningkatan konektivitas kabupaten/kota. Fokus ini dibutuhkan karena sumber-sumber produksi suatu komoditas baik pertanian maupun non-pertanian secara demografi berada di kabupaten/kota.

Kedua, daerah dengan sanitasi layak masih kurang dari 80 persen perlu diprioritaskan. Dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan target hunian dengan akses sanitasi layak sebesar 90 persen pada tahun 2024. Namun, dalam RKP tahun 2024 hanya ditargetkan sebesar 85 persen untuk tahun 2023 dan 86 persen untuk tahun 2024. Hal ini jauh dibawah target RPJMN. Per tahun 2022, daerah yang telah mencapai target sanitasi layak sebesar 90 persen baru terdapat 6 daerah yaitu Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta. Sedangkan 28 daerah lainnya masih di bawah target nasional.

Ketiga, daerah dengan persentase hunian yang layak dan terjangkau kurang dari 50 persen perlu diprioritaskan. Dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan target rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 70 persen pada tahun 2024. Berdasarkan data BPS, persentase hunian yang layak dan terjangkau cenderung stagnan berkisar

60,36 persen atau meningkat sebesar rata-rata 0,56 persen selama periode 2020-2022;

Keempat, perlunya pembangunan yang terintegrasi antara saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier. Beberapa persoalan pada bidang komoditas pangan dan konsumsi pangan yang selama ini terjadi yaitu : (i) Luas lahan sawah yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 10,66 juta hektar tahun 2020 menjadi 10,45 juta hektar tahun 2022. (ii) Produktivitas yang cenderung stagnan dalam dua tahun terakhir yaitu berkisar 52,26-52,38 kuintal per hektar. (iii) Perkembangan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan selama periode 2017-2022 menunjukkan tren peningkatan, dari 8,23 persen tahun 2017 menjadi 10,21 persen tahun 2022. Oleh sebab itu pembangunan bendungan untuk tahun 2024 harus diprioritaskan untuk penyediaan atau peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi. Bendungan tersebut sebaiknya menjadi satu paket dengan saluran irigasi sekunder dan tersier. Untuk menjadi satu paket, maka perlunya sinergitas antara kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam pembangunan irigasi;

Kelima, dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum layak diprioritaskan pada daerah yang angka kemiskinan ekstremnya tinggi dengan akses air minum layak dan sanitasi layak di bawah rata-rata nasional;

Keenam, dalam rangka penurunan stunting, pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum layak diprioritaskan pada daerah yang angka stunting tinggi dengan akses air minum layak di bawah rata-rata nasional. Salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2024 yaitu mengakselerasi penurunan prevalensi stunting menuju 14 persen pada tahun 2024. Akselerasi ini akan diupayakan melalui terobosan kebijakan yang salah satunya berkaitan dengan air bersih yang merupakan salah satu determinan kuat atau pemicu utama stunting.

Kemudian, BPK telah menyimpulkan bahwa regulasi untuk persiapan, pembangunan, ataupun pemindahan IKN ternyata belum lengkap. Seluruh regulasi tersebut seharusnya mengatur 64 aspek mengenai pemindahan ibu kota negara. Namun laporan BPK menyebutkan baru 37 aspek yang terakomodasi. Padahal ada 12 aspek yang dinilai urgen dari sisa 27 aspek yang belum diatur. Diantara aturan yang krusial adalah terkait kewenangan khusus OIKN serta aspek peninjauan terhadap rincian rencana induk IKN Nusantara yang seharusnya segera diurus. Kewenangan OIKN yang belum jelas ini menimbulkan banyak ketidakpastian hukum yang merembet ke masalah pertanahan sehingga banyak status tanah yang belum sepenuhnya bebas alias clean and clear. Hal ini terbukti adanya perkara konflik agraria dengan penduduk lokal dan masyarakat adat yang lebih dulu menempati lahan yang diklaim sebagai wilayah IKN, serta juga dengan beberapa pengembang perumahan bersubsidi yang telah memiliki tanah di IKN tapi ternyata belakangan masuk dalam peta wilayah IKN.

62. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM agar naik kelas bahkan berdaya saing internasional. Fraksi PKS memperhatikan bahwa Pemerintah perlu untuk mendukung partisipasi UMKM dalam Ekonomi digital dan Pasar Internasional. Peran UMKM dalam Pasar Internasional

diharapkan mampu meningkatkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung oleh UMKM. Mengingat, sektor UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Fraksi PKS memandang rencana anggaran Kemenkop UKM yang meningkat mencapai 50 persen, namun perhatian dan dukungan terhadap UMKM masih kurang memadai. Di sektor Transformasi Digital dan proporsi kredit UMKM. Transformasi digital UMKM di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan beberapa negara lain di Asia. Transformasi digital UMKM Indonesia baru mencapai 13 persen pada 2020 dan ditargetkan sebesar 47 persen pada 2024, sedangkan Tiongkok dan Jepang telah mencapai masing-masing 48 persen dan 54 persen di 2020 dan berpotensi mencapai 78 persen dan 84 persen pada 2024 (Data Kemenkop UKM RI).

Selain itu, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan di Indonesia pada 2021 masih sebesar 20 persen. Jumlah ini lebih rendah dari negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura yang sebesar 39 persen, Thailand 50 persen, dan Malaysia 51 persen. Adapun dibandingkan negara maju, Indonesia tertinggal dari Jepang yang 66 persen, Korea Selatan 81 persen, dan Australia 29 persen (data Kementerian Investasi seperti dikutip Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia). Ini sangat menyedihkan, Negara sudah mengeluarkan uang banyak dan menambah anggaran, tapi performa Kemenkop UKM belum optimal.

Kegiatan Kemenkop UKM sehubungan dengan penggunaan anggaran 2024 masih bertumpu pada pendataan KUMKM, yang ditargetkan 18 juta data. Di sisi lain, kegiatan pengembangan korporasi petani nelayan, kegiatan pendampingan usaha mikro untuk mendapatkan NIB, masih sangat sedikit. Pengembangan korporasi petani nelayan hanya ditargetkan 50 koperasi, sedangkan fasilitasi Usaha Mikro untuk penerbitan NIB hanya 15.800 UMi (Usaha Mikro). Dalam penyusunan program, Kemenkop UKM juga perlu menyesuaikan proporsi Program dukungan Manajemen dengan Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi.

63. Kemudian, Fraksi PKS memandang bahwa anggaran revitalisasi pasar rakyat perlu ditingkatkan, Untuk Memperkuat fungsinya sebagai pengendali harga bahan pokok. Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap program revitalisasi pasar rakyat melalui anggaran tahun 2024. Mengingat hal ini merupakan program nasional, sudah seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah. Terlebih lagi usulan tambahan Anggaran tahun 2024 didominasi oleh program Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Jajanan Kuliner dan Cinderamata. Selain itu pasar rakyat merupakan pusat perekonomian rakyat, sudah pasti dengan adanya pasar rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga tidak boleh tebang pilih terhadap Pemerintah Daerah yang akan melakukan revitalisasi pasar rakyat, sehingga pengembangan pasar rakyat melalui program revitalisasi dapat menyeluruh.
64. Fraksi PKS mengapresiasi dukungan dan komitmen pemerintah terhadap Politik Anggaran bagi Kementerian/Lembaga yang menjalankan fungsi dibidang ketertiban dan keamanan yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan dan terakhir dalam nota keuangan APBN 2024 diusulkan mencapai Rp188,8 triliun atau tumbuh 2,6 persen dari anggaran

tahun berjalan. Namun, Fraksi PKS menyoroti perlunya keseimbangan pertumbuhan anggaran diantara lembaga penegakan hukum yang dalam hal ini kurang mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Sebagai contoh, pada satu sisi kita menyambut baik peningkatan anggaran bagi kejaksaan yang mencapai Rp 3,6 triliun (26%) namun pada saat bersamaan lembaga penegak hukum lainnya seperti BNN dan Mahkamah Agung justru mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat kondisi dan sorotan tajam terhadap lembaga tersebut hendaknya didukung dengan pembenahan manajerial dan dukungan anggaran yang memadai untuk mentransformasi dirinya menjadi lebih baik. Fraksi PKS Mendorong agar program prioritas di Kementerian Hukum dan HAM khususnya untuk pembangunan Lapas dan Rutan baru dalam rangka penanggulangan dampak kelebihan kapasistas Lapas/Rutan di Indonesia menjadi prioritas. Selain itu Fraksi PKS juga mendukung penambahan anggaran bantuan hukum bagi kelompok rentan (vulnerable group) seperti fakir miskin, wanita/anak-anak dapat ditingkatkan sekurangnya 25 persen dari pagu anggaran tahun berjalan.

65. Fraksi PKS mendesak pemerintah agar memastikan bahwa Belanja Negara 2024 ditambahkan atau sudah memperhitungkan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN baik PNS maupun P3K Guru dan Tenaga Kependidikan (Guru ASN, non-ASN, Honorer dan Swasta) agar penyelenggaraan sektor pendidikan di negeri ini terjamin keberlangsungannya. Mengingat guru adalah garda terdepan dalam usaha-usaha mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Fraksi PKS memandang bahwa profesi guru dan profesi lainnya adalah profesi yang mulia.
66. Fraksi PKS memandang agar Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat berlaku seumur hidup. Pemberlakuan ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani setiap lima tahun sekali melakukan perpanjangan masa berlaku SIM, baik beban ekonomi maupun beban waktu dan tenaga. Hal ini juga sebagai insentif masyarakat kecil yang sebagian besar menjadikan motor sebagai bagian dari alat transportasi untuk mencari penghasilan. Pembaruan SIM setiap lima tahun sekali dapat merepotkan karena harus mengorbankan waktu produktif atau waktu mencari penghasilan untuk mengurus administrasi perpanjangan masa berlaku SIM. Dengan dihilangkannya kewajiban ini maka dapat mempunyai efek positif kepada penghematan waktu produktif masyarakat. Selain itu, dengan hanya membayar sekali saja pengurusan untuk mendapatkan SIM maka pembebasan ini dapat memberikan keringanan masyarakat. Namun, pemberlakuan ini dapat dievaluasi jika selama penggunaan SIM terjadi pelanggaran hukum lalu lintas berat atau yang disamakan dengannya sehingga SIM dapat dicabut. Bagi pengendara yang SIM-nya dicabut dapat mengajukan kembali permohonan SIM baru dan menempuh ujian untuk mendapatkan SIM sebagaimana peraturan yang berlaku.
67. Selanjutnya, Fraksi PKS berpandangan agar Pemerintah membebaskan kewajiban pembayaran pajak bagi Wajib Pajak pribadi berpenghasilan sampai dengan Rp8 juta per bulan. Fraksi PKS berpandangan hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi rendahnya daya beli dan mengurangi beban kesulitan hidup yang mendera masyarakat kecil dan rentan. Selain itu ada

beberapa pertimbangan yang Fraksi PKS berikan di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi stagnan dan pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan PTKP belum cukup mendongkrak daya beli masyarakat, besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan, dibutuhkan stimulus fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program ini tidak akan membebani APBN secara signifikan, mengurangi beban perusahaan dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Fraksi PKS berpandangan bahwa meskipun kebijakan ini akan berdampak pada penurunan penerimaan PPh, namun di sisi lain ini merupakan potensi daya beli yang dapat meningkatkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, potensi kehilangan penerimaan PPh tersebut sangat mungkin dikompensasi oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi masyarakat yang menguat serta transaksi ekonomi yang meningkat. Selain itu, kehilangan potensi penerimaan PPh tersebut dapat pula ditutup dengan program-program ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak yang perlu terus dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa memberatkan masyarakat.

68. Kemudian, Fraksi PKS mendorong dan mendesak agar Pemerintah tidak mengenakan pungutan atau pajak dalam bentuk apapun terhadap honor relawan-relawan di desa seperti kader posyandu, relawan jumantik, relawan Keluarga Berencana, Kader PLKB, Kader Pendamping Petani dan Nelayan, dan seterusnya dengan mekanisme Pajak DTP. Termasuk juga dengan pengadaan-pengadaan di desa yang bersifat kebutuhan primer masyarakat desa dengan jumlah tidak besar dan bersumber dari Dana Desa.

Transfer Ke Daerah

69. Fraksi PKS memandang bahwa naiknya porsi TKD dalam RAPBN tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp857,6 triliun, lebih tinggi sebesar Rp32,2 triliun atau 3,9 persen dibandingkan outlook tahun 2023 harus disertai dengan perbaikan tata kelola, pengalokasian, serta penggunaan TKD secara optimal dan berkualitas. Hal ini menjadi penting mengingat pembangunan di daerah pada akhirnya merupakan wujud kontribusi daerah dalam rangka pembangunan nasional. Untuk itu, Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan komitmen dan konsistensi penyaluran dan penggunaan TKD sesuai arah kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga dana transfer ke daerah ini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia tanpa kecuali.
70. Fraksi PKS memandang penting mengingatkan bahwa kebijakan TKD 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD, dengan pokok-pokok kebijakannya, yakni: 1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi; 3. Memperkuat earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan

transformasi ekonomi antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK; 4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek; 5. Menerbitkan pedoman/juknis dan peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai; 6. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi, sesuai kondisi di masing-masing daerah serta mempertimbangkan masukan-masukan daerah; 7. Menerapkan aturan yang mendorong pemerintah daerah agar TKD digunakan untuk mendanai kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi.

71. Fraksi PKS mendorong konsistensi minimal 20 persen pengalokasian APBN untuk anggaran pendidikan baik melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), dan juga pembiayaan. Melihat alokasi terbesar anggaran pendidikan ada dalam TKD yang di tahun 2023 mencapai 49,9 persen dari total anggaran pendidikan keseluruhan, maka harus dipastikan anggaran pendidikan sebesar Rp346,6 triliun yang direncanakan melalui TKD tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk SDM, infrastruktur, sarana prasarana penunjang, guru dan tenaga pendidik sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pendidikan, termasuk memastikan bahwa dana tersebut sudah memperhitungkan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN baik PNS maupun PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan (Guru PNS, Honorer dan Swasta) agar penyelenggaraan sektor pendidikan di negeri ini terjamin keberlangsungannya. Mengingat guru adalah garda terdepan dalam usaha-usaha mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Selanjutnya, melihat alokasi anggaran pendidikan yang tersebar hampir di semua jenis TKD, Fraksi PKS juga mendesak adanya peningkatan konsep, pengawasan dan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending pendidikan melalui porsi TKD.
72. Fraksi PKS berpendapat bahwa mandatory spending kesehatan di angka 5 persen masih belum memadai sehingga harus ditingkatkan. Tetapi realisasinya, justru mandatory spending kesehatan dihapuskan di UU Kesehatan yang baru. Dihapuskannya Pasal 171 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 2009 yang mengamanatkan alokasi anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN, menjadi salah satu alasan penolakan Fraksi PKS terhadap UU Kesehatan yang baru. Penyediaan anggaran ini semestinya merupakan jaminan pemerintah bagi pembangunan di bidang kesehatan. Adanya mandatory spending kesehatan sebagai belanja atau pengeluaran negara yang diatur oleh undang-undang juga bentuk pemerintah hadir dan bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ketiadaan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan sejumlah tertentu anggaran di bidang kesehatan bisa mengancam keberlangsungan jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa kesehatan adalah salah satu hak dasar bagi semua penduduk yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara dan dijamin oleh konstitusi. Jelas diatur dalam UUD RI 1945, Pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

73. Fraksi PKS kembali mengingatkan pentingnya unsur keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH pajak (PPH, PBB, dan cukai hasil tembakau) dan DBH sumber daya alam/SDA (migas, minerba, panas bumi, kehutanan, perikanan). Dari alokasi TKD pada RAPBN 2024 yang direncanakan sebesar Rp857,6 triliun, anggaran sebesar Rp143,1 triliun atau turun sebesar Rp17,9 triliun yang dialokasikan untuk DBH, harus konsisten dengan tujuan dasar penyalurannya, yakni untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan pembangunan di daerah, meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketimpangan bagi daerah penghasil, non penghasil, termasuk dampak eksternalitas negatifnya. Untuk itu, Fraksi PKS menekankan bahwa setiap permasalahan yang terjadi baik terkait ketidakpuasan daerah penghasil, keberatan pemda atas besaran DBH, penyelesaian kurang dan lebih bayar DBH harus diakomodir dan segera diselesaikan dengan tetap memerhatikan unsur keadilan, transparansi dan akuntabilitasnya.
74. Fraksi PKS menyoroti pentingnya tetap memerhatikan kebutuhan pokok pendanaan dan pelayanan publik di daerah, karena setiap daerah memiliki skala prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Perubahan substansial terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dalam desain UU No.1/2022 harus sejalan dengan tujuan DAU yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah dalam sektor layanan publik. Mengingat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan TKD dengan porsi tertinggi (tahun 2019 sampai tahun 2023), termasuk yang direncanakan dalam RAPBN tahun 2024 yakni sebesar Rp427,7 triliun, lebih tinggi sebesar Rp39,7 triliun atau 10,2 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2023. Apalagi mengingat bahwa DAU masih menjadi salah satu sumber pendapatan tertinggi dalam APBD, maka dapat dipastikan banyak daerah yang menggantungkan kebutuhan dasar daerahnya dari alokasi DAU ini.
75. Fraksi PKS memandang bahwa top-down dalam perencanaan program daerah merupakan salah satu indikator sentralisasi. Terlihat pada UU HKPD Pasal 131, tergambar bahwa masih tingginya intervensi Pemerintah Pusat dalam proses perencanaan dan penggunaan DAK. Sedangkan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menganut prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Mekanisme top-down tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang digagas dalam UU tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam RAPBN 2024 direncanakan sebesar Rp188,1 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp8,1 triliun dibandingkan dengan outlook tahun 2023 akan menjadi salah satu dana yang berperan dalam mendukung pembangunan di daerah. Selama ini DAK masih bersifat top-down sehingga dikhawatirkan akan memunculkan ketidakselarasan dengan kebutuhan daerah.
76. Fraksi PKS kembali mengingatkan pentingnya grand design terkait rencana induk percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah otonomi khusus yang berkesinambungan, sehingga target/capaian menjadi jelas dan

terukur. Dana otonomi khusus pada RAPBN 2024 yang direncanakan sebesar Rp18,3 triliun, meliputi dana otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua, dana otsus provinsi Aceh, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus. Efisiensi, efektivitas, penguatan asistensi, supervisi, dan akuntabilitas dana otonomi khusus harus terus diperkuat dengan tujuan yang mendasar yakni tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus, Fraksi PKS mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan DPR, DPD, BPK, dan elemen masyarakat.

77. Fraksi PKS memandang penting untuk terus dilakukan peningkatan kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DI Yogyakarta yang terintegrasi. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta direncanakan tetap sebagaimana outlook di tahun 2023 yakni sebesar Rp1,4 triliun. Mengingat Dana Keistimewaan DIY dialokasikan dalam APBN sejak tahun 2013 dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan DI Yogyakarta, sesuai mandat pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
78. Fraksi PKS memandang penting adanya sosialisasi berkelanjutan dan transparansi atas kriteria serta hasil penilaian daerah penerima insentif fiskal yang anggarannya direncanakan sebesar Rp8,0 triliun dalam RAPBN 2024. Hal ini menjadi penting karena insentif fiskal merupakan reward yang diberikan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyediaan layanan dasar publik, peningkatan perekonomian daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat adanya poin penting yang termasuk dalam indikator penilaian, maka sosialisasi juga harus jelas dan terarah, sehingga meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah dalam rangka memperbaiki kinerja daerahnya serta memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan insentif sesuai klasterisnya. Selain itu, Fraksi PKS juga memandang penting adanya transparansi dalam hal keputusan atas daerah yang menerima insentif fiskal sehingga tidak menimbulkan kecemburuan bagi daerah-daerah yang belum atau tidak mendapatkan insentif fiskal.
79. Fraksi PKS mendukung dan mendorong peningkatan Dana Desa di tahun 2024 sebagaimana direncanakan dalam RAPBN tahun 2024 sebesar Rp71 triliun, lebih tinggi Rp1 triliun atau 1,5 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2023. Tentu saja hal tersebut harus disertai dengan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasannya. Selain itu, Fraksi PKS juga memandang pentingnya dukungan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa. Penggunaan Dana Desa juga harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa, dengan tetap memerhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi di masing-masing desa.
80. Fraksi PKS memandang mekanisme top-down dalam arah penggunaan Dana Desa juga merupakan salah satu indikator sentralisasi, padahal setiap desa memiliki karakteristik berbeda sehingga mekanisme top-down tidak tepat. UU HKPD juga menjadi tidak sejalan dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

yang memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa yang selanjutnya disebut "Otonomi Desa" sebagai otonomi yang asli, bulat dan utuh.

81. Fraksi PKS memandang penting adanya konsistensi pendampingan dan pembinaan serta mitigasi risiko atas permasalahan implementasi pengelolaan keuangan di desa mengingat masih banyaknya keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Terkait dengan penguasaan IT, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa. Selain itu, pentingnya peningkatan kapasitas pemahaman terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa terutama bagi kepala desa beserta perangkat desa dan jajarannya karena prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPj) masih dianggap rumit oleh aparatur Pemerintah Desa. Masih adanya beberapa Kepala Desa yang kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa juga menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan dana desa. Masalah berikutnya yang juga harus diperhatikan adalah alur pencairan yang masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian pemangku kepentingan desa dan masih kurangnya sarana prasarana di kantor desa.
82. Fraksi PKS juga memandang pentingnya pemetaan risiko terkait pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas TKD. Mengingat nilai alokasi TKD yang besar setiap tahunnya menjadi sangat rawan dengan berbagai modus penyelewengan dan tindak pidana korupsi. Dana transfer ke daerah memiliki porsi sepertiga dari anggaran negara dan porsi dana TKD sendiri pada rentang waktu 2017 sampai 2022 mencapai 21 persen sampai dengan 37 persen dalam belanja pemerintah. Sedangkan ketergantungan daerah terhadap dana TKD mencapai kurang lebih 56 persen dari pendapatan daerah pada tahun 2017 sampai 2022. Sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2022, KPK telah menangani setidaknya 178 kepala daerah yang terdiri dari 23 gubernur, 155 walikota/bupati/wakil yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Setengah dari jumlah tersebut, tercatat ada 113 kepala daerah yang kasusnya terjadi dalam enam tahun terakhir.
83. Fraksi PKS memandang penting mitigasi risiko terkait permasalahan masih tingginya dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank. Jangan sampai opini yang muncul justru hanya karena faktor ketidakmampuan daerah dalam mengelola dana TKD. Mengingat bahwa berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, dana pemerintah daerah (pemda) tersimpan di perbankan yang jumlahnya mencapai Rp278,73 triliun per Oktober 2022 disebabkan karena alasan tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada Oktober tahun 2022. Permasalahan seperti ini harus segera teratasi sehingga tidak sekedar mengkambinghitamkan ketidakmampuan daerah dalam mengelola TKD saja, tetapi lebih pada bagaimana TKD disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah.
84. Fraksi PKS juga memandang penting terhadap penguatan dukungan sistem informasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah, sehingga sinergi yang

lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat terwujud. Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong peningkatan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan UU HKPD dalam meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal nasional, sehingga tidak terjadi sebaliknya (justru mereduksi semangat desentralisasi).

Defisit dan Pembiayaan

85. Fraksi PKS memandang penetapan defisit APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau -2,29 persen dari PDB harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama beberapa tahun terakhir stagnan. Data menyebutkan bahwa realisasi pertumbuhan hanya berkisar di angka 4,88-5,31 persen, artinya bahwa target pertumbuhan yang disebutkan pada dokumen RPJMN 2020-2024 jauh dari kata tercapai. Pemerintah hanya memanfaatkan kelonggaran defisit anggaran, namun tidak memiliki kecakapan dalam mengoptimalkan defisit sebagai daya ungkit pertumbuhan. Defisit anggaran hanya memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara, berupa penambahan utang yang membebani anggaran periode mendatang. Dari segi kuantitas pertumbuhan saja, dengan kebijakan defisit anggaran, pemerintah tidak mampu mencapainya, dengan fakta tersebut Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana pemerintah merealisasikan agenda untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan?
86. Fraksi PKS menilai bahwa defisit anggaran semestinya bukan menjadi alat pemerintah untuk bersantai dalam penggunaan anggaran. Di samping diwajibkan menciptakan sumber-sumber penerimaan baru, dari segi kebijakan belanja juga harus diarahkan agar lebih efektif dan efisien. Sehingga kedepannya defisit dapat dipersempit lagi, bahkan tidak mungkin APBN menjadi lebih berdaulat. Defisit harus dimaksimalkan untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Pemerintah juga dituntut untuk mendesain kebijakan defisit anggaran yang mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif.
87. Fraksi PKS berpandangan bahwa kebijakan defisit keseimbangan primer sebesar Rp25,5 triliun atau 0,1 persen dari PDB akan berdampak pada pemupukan utang. Pemerintah mengambil kebijakan ini yang artinya bahwa prospek kinerja penerimaan anggaran 2024 tidak akan mampu menutupi beban belanja termasuk pembayaran bunga utang. Kedaulatan fiskal kembali menjadi momok, karena untuk menutupi beban bunga utang, harus memproduksi utang baru. Defisit keseimbangan primer juga mengindikasikan bahwa penerbitan utang baru yang digunakan untuk belanja yang tidak produktif, karena utang menjadi sumber dana untuk menutupi beban bunga utang.
88. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa keseimbangan primer erat kaitannya dengan kesinambungan fiskal. Keseimbangan primer yang selalu defisit mengancam kesinambungan fiskal. Data menyebutkan bahwa realisasi keseimbangan primer bernilai positif terakhir pada 2008, artinya dua periode

masa pemerintahan sekarang selalu mengalami defisit keseimbangan primer, bahkan pada 2020 mencapai titik terendah hingga -4,1 persen atau Rp633,6 triliun. Pemerintah semestinya segera mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah dikeluarkan. Efektivitas kebijakan dapat dilihat dengan jaminan adanya kesinambungan fiskal, di mana semestinya utang dapat terkendali dan kemampuan membayar tanpa penerbitan utang baru dapat dilaksanakan demi kelancaran fungsi ekonomi. Pemerintah tidak boleh selalu berlindung dari adanya gejolak ekonomi global yang menyebabkan ketidakpastian, sebaliknya harus mampu segera menyesuaikan kebijakan yang efektif untuk menghadapi segala pengaruh yang datang dari luar. Hal ini karena kesinambungan fiskal merupakan faktor dominan dari keadilan antargenerasi.

89. Fraksi PKS menilai kinerja anggaran yang dilaporkan selama empat tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan tidak ada perbaikan signifikan. Pemerintah hanya menjalankan *business as usual* yang minim inovasi kebijakan (skenario *baseline* yang disebutkan dalam LHR Kesinambungan Fiskal-LKPP TA 2019). Sebagai hasilnya adalah pertumbuhan yang hanya berkisar 4 hingga 5 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan potensialnya dan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Pertumbuhan pendapatan tidak ditopang oleh faktor fundamental, melainkan karena adanya volatilitas harga *Indonesia Crude Price* (ICP) dan program Tax Amnesty jilid II (UU HPP). Sedangkan di sisi belanja negara, lebih ditonjolkan terkait kuantitas serapan dibandingkan dengan kualitas. Kondisi demikian menyebabkan keseimbangan primer tidak kunjung positif. Anggaran tetap menganut rezim defisit serta akumulasi utang terus meningkat, yang pada akhirnya mengancam kesinambungan fiskal pada jangka panjang.
90. Fraksi PKS memandang target pembiayaan utang pada 2024 sebesar Rp 648,1 triliun masih terlalu besar. Dengan penambahan pembiayaan utang senilai tersebut, maka akan menempatkan rasio utang pada kisaran 38,07-38,97 persen. Rasio tersebut telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh *International Debt Relief* (IDR) sebesar 20-25 persen dan IMF sebesar 25-30 persen. Akumulasi utang semakin meningkat, pada akhir Juli 2023 saja sudah mencapai Rp7.855,5 triliun. Apabila kenaikan utang tidak segera diatasi dan pemerintah mempertahankan skenario *baseline*, maka rasio utang terhadap PDB pada 2043 akan mengalami peningkatan dan berpotensi melampaui aturan fiskal yang diatur konsitusi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) yaitu 60 persen dari PDB.
91. Fraksi PKS mencermati kemandirian pembangunan nasional dari jerat hutang cukup mengkhawatirkan. Beban utang pemerintah yang akan diwariskan pada generasi mendatang angkanya sudah mencapai Rp7.855,5 triliun per 31 Juli 2023. Dengan jumlah itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 37,8 persen. Selain itu, pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2024 mencapai Rp497,32 triliun atau meningkat 12,7 persen dari tahun 2023. Bunga utang mencapai 15,05 persen dari belanja negara, 75,5 persen dari anggaran pendidikan dan 266 persen dari belanja kesehatan, sebuah nilai yang sangat membebani APBN. Sayangnya APBN yang terbatas justru digunakan untuk proyek yang ambisius, tidak prioritas, bahkan bermasalah sejak perencanaan

seperti proyek Ibu Kota Negara baru, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, termasuk penyertaan modal untuk BUMN-BUMN yang terus merugi. Proyek IKN dan Food Estate yang berpotensi gagal dan merusak lingkungan, sama-sama berpotensi disebut sebagai kejahatan lingkungan.

92. Fraksi PKS memandang pembiayaan investasi yang dianggarkan sebesar 176,2 triliun dengan kenaikan yang cukup fantastis dari pagu awal senilai Rp33,9 triliun perlu dievaluasi kembali. Salah satu *highlight* aliran PMN adalah Jiwasraya sebesar Rp5,7 triliun. Pada hasil pemeriksaan BPK, ditemukan beberapa permasalahan, seperti Pengelolaan PMN serta pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungjawaban dan aset tidak sesuai ketentuan karena perencanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Kajian Bersama PMN belum didukung perhitungan yang memadai. Sedari awal mencuatnya kasus Jiwasraya dan beberapa persoalan asuransi lainnya, Fraksi PKS konsisten bahwa bailout yang dilakukan pemerintah, tidak mencerminkan keadilan anggaran. Akibat dari adanya *Moral hazard* serta *missmanagement* di tubuh BUMN seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara. Sumber APBN yang diambil dari rakyat Indonesia harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menutupi kerugian akibat penyelewengan sekelompok oknum pegawai atau pejabat BUMN.
93. Fraksi PKS memberi catatan berdasarkan pemeriksaan BPK 2022, terdapat permasalahan pekerjaan belum selesai sebesar Rp10,49 triliun yang didanai dari penanaman modal negara (PMN) pada 13 BUMN. Nilai tersebut terdiri atas total nilai aset yang belum produktif karena belum selesai dikerjakan sebesar Rp10,07 triliun dan belanja operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp424,11 miliar. Tercatat bahwa kelalaian BUMN dalam penyelesaian proyek yang diamanahkan dari dana PMN disebabkan karena sebagian besar memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Pemerintah seharusnya tidak hanya 'rajin' dalam mengajukan anggaran PMN, namun juga mengevaluasi kembali penggunaan dana PMN yang telah dikucurkan.
94. Fraksi PKS senantiasa mengingatkan Pemerintah agar mampu mengoptimalkan anggaran secara produktif, efektif dan efisien, sehingga meminimalisir timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun 2024. SiLPA yang timbul setiap tahunnya menyebabkan akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL), hingga 2022 mencapai Rp478,95 triliun. Sejak tahun 2014 sampai 2019 terjadi tren kenaikan SiLPA, yang mengalami kulminasi pada 2020 mencapai Rp388,12 triliun dan 2021 tercatat sebesar Rp337,78 triliun. Dengan banyaknya dana tersebut, pemerintah tidak berinisiatif memanfaatkan dana SAL secara optimal, bahkan 2022 pemerintah sama sekali tidak menyentuh dana SAL. Padahal SAL bukanlah dana yang secara cuma-cuma diperoleh pemerintah, melainkan dari penerbitan utang yang berbiaya mahal. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan perbaikan perencanaan keuangan dan realisasi program dengan optimal, sehingga tidak ada anggaran yang *idle*.

Hadirin yang Kami Muliakan,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, atas perhatiannya.

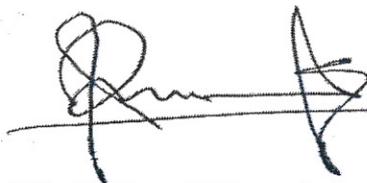
**Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Jakarta, 07 Safar 1445 H

22 Agustus 2023 M

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

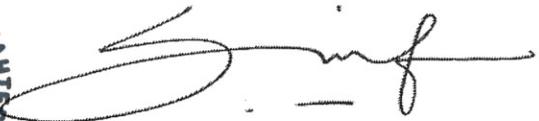
Ketua



DR. H. Jazuli Juwaini, M.A.

No. Anggota: A-449

Sekretaris



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T.

No. Anggota: A-427